

KESIAPAN PT PINDAD DALAM MEMPRODUKSI ALUTSISTA GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN

Indah Octavia Amarilia¹, Servasius Anu², Raisara Ainie³, Rhandu Inzany⁴,
A Muh Alif Ranggong⁵

¹⁻⁵Universitas Pertahanan

Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Email:indahocta.amr02@gmail.com

Abstract. *Indonesia is trying to build defense capabilities by establishing a Minimum Essential Force (MEF) to build the independence of the defense industry. Thus, the domestic defense industry is still cooperating with similar industries abroad which have more advanced industrial progress than Indonesia. One of them is PT. Pindad Persero which is still importing raw materials for each product they issue. Challenges and Strategies of PT. Pindad in realizing the independence of the defense industry, still has a lot of lagging behind in technology, innovation, diplomacy and policy steps taken in realizing the independence of the Defense Industry in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method because the data obtained are qualitative data, which describes the real conditions in the field. The purpose of this research is to find out PT Pindad's strategy in realizing the independence of the defense industry. The results of the study show that the realization of PT. Pindad's defense industry independence is driven by efforts to transfer technology, or funding in the form of offsets and also trade compensation for defense and security equipment products imported from abroad.*

Keywords: *Defense Industry, Minimum Essential Force, Pindad.*

Abstrak. Indonesia sedang berupaya membangun kapabilitas pertahanan dengan menetapkan Minimum Essential Force (MEF) untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Dengan demikian industri pertahanan domestik masih melakukan kerjasama dengan industri sejenis di luar negeri yang memiliki kemajuan industri lebih mumpuni dari Indonesia. Salah satunya ialah PT. Pindad Persero yang masih melakukan impor bahan baku material untuk setiap produk yang mereka keluarkan. Tantangan dan Strategi PT. Pindad dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, masih memiliki banyak ketertinggalan dalam teknologi, inovasi, diplomasi dan langkah kebijakan yang diambil dalam mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena adanya data-data yang diperoleh adalah data kualitatif, yakni menggambarkan adanya kondisi riil di lapangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi PT Pindad dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Hasil Penelitian menunjukkan perwujudan kemandirian industri pertahanan PT.Pindad didorong upaya alih teknologi, ataupun pendanaan dalam bentuk offset dan juga imbal dagang untuk produk alat peralatan pertahanan dan keamanan yang didatangkan dari luar negeri.

Kata kunci: Industri Pertahanan, *Minimum Essential Force*, PT Pindad

LATAR BELAKANG

Kekuatan suatu negara di dunia tidak hanya mementingkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia saja atau dalam hal ini militer, melainkan ketersediaan kecanggihan alat militer perlu dimiliki setiap negara. Ketersediaan dan kecanggihan alat militer didukung oleh industri pertahanan yang melakukan produksi mengikuti perkembangan teknologi dunia. Industri pertahanan yang kuat menjadi salah satu ciri kemajuan negara tersebut. Hal itu terlihat pada negara-negara kuat di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Perancis yang memiliki kecanggihan alat militer dan melakukan jual beli pada pasar global. Perekonomian suatu negara berkaitan erat dengan industri pertahanan, terlebih Indonesia memiliki potensi besar untuk memiliki perekonomian yang kuat karena besarnya kuantitas sumber daya di Indonesia.

Saat ini Indonesia sedang berupaya membangun kapabilitas pertahanan dengan menetapkan sasaran pokok jangka panjang untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Pemerintah menerbitkan kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri pertahanan. Selain penerbitan UU, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tujuan sebagai jembatan penghubung antara kebutuhan militer dengan pengembangan industri strategis (Fitri & Debora, 2018). Bagi Indonesia, memiliki industri pertahanan yang mandiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi cita-cita yang besar. Menurut Karim (2014), penguatan dalam sistem pertahanan Indonesia lebih banyak didukung oleh pasokan alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri. Hal tersebut menjadi kesulitan Indonesia sebagai negara berkembang karena masih mengutamakan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar, dan pendidikan atau kesehatan, dimana kemandirian industri pertahanan menjadi tugas paling sulit yang perlu diwujudkan.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Laporan Data Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menjelaskan terkait alutsista yaitu bagian dari Alpalhankam yang merupakan satu kesatuan sistem senjata secara terintegrasi atau bagian dari sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Lebih lanjut, Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) adalah segala alat

perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat alat utama sistem senjata (Kemhan, 2019).

Susdarwono (2020) berpendapat bahwa industri dan teknologi pertahanan Indonesia hingga saat ini masih memerlukan pengaturan untuk meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan, baik mengenai teknologi yang akan digunakan maupun biaya modal dan pembiayaan secara umum, produksi dan produktivitas dari perusahaan industri pertahanan perlu diperhatikan setiap aktivitasnya secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa peranan penelitian dan pengembangan (litbang) dalam industri pertahanan sangat dibutuhkan.

Pencapaian optimalisasi industri pertahanan pada negara kepulauan terdapat beberapa permasalahan pertama aspek regulasi pemerintah belum sepenuhnya mengembangkan visi yang menjadi poros maritim dunia karena pembangunan ekonomi masih bersegi land based oriented. Kedua aspek teknologi untuk pemanfaatan SDA laut yang masih rendah dengan terbukti masih belum pasti data potensi kekayaan alam laut Indonesia. ketiga aspek SDM atau sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai ilmu kelautan. Keempat keamanan pengawasan laut belum terintegrasi dan masih tersebar diberbagai instansi, permasalahan diwilayah perbatasan laut. Kelima aspek undang-undang yang masih tumpang tindih yang masih belum memasukkan urusan udara, laut dan darat sebagai satu kesatuan. Aspek Keenam yaitu kelembagaan yang koordinasi dan pengawasan yang tidak efisien terkesan berjalan sendiri-sendiri tidak terorganisasi dengan baik. Permasalahan pembangunan negara kepulauan yang mandiri dan merdeka menjadi terhambatnya pembangunan industri pertahanan (Rusdiana, dkk., 2021).

Industri pertahanan Indonesia tidak bisa benar-benar mandiri karena tertinggalnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan minimnya komitmen dalam penelitian dan pengembangan (litbang). Dengan demikian industri pertahanan domestik masih melakukan kerjasama dengan industri sejenis di luar negeri yang memiliki kemajuan industri lebih mumpuni dari Indonesia. Salah satunya ialah PT. Pindad Persero yang masih melakukan impor bahan baku material untuk setiap produk yang mereka keluarkan. Hal tersebut disampaikan oleh *Vice President* (VP) Perencanaan Kinerja Perusahaan PT. Pindad Jawa Timur dalam Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Universitas Pertahanan tahun 2022 bahwa, PT. Pindad belum memiliki kemampuan memproduksi mesin sebagai

penunjang utama pembuatan alat-alat militer. Selain itu, terbatasnya sumber daya mengharuskan PT. Pindad untuk mengimpor bahan baku produk dari luar negeri karena belum ditemukannya bahan baku tersebut di Indonesia, salah satunya bahan Mesiu untuk munisi. Sebagai gambaran mengenai PT. Pindad ialah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada industri pertahanan Indonesia khususnya dalam pembuatan produk militer dan komersial (bumninfo, 2019)

Tantangan industri pertahanan yang masih memiliki banyak ketinggalan dalam teknologi dan sumber daya menjadi sebuah kesulitan dalam mewujudkan kemandirian. Fitri dan Debora (2018) menjelaskan bahwa tantangan-tantangan industri pertahanan yang masih harus dikaji ulang untuk mencapai kemandirian ialah sebagai berikut: kurangnya pendanaan untuk penelitian dan pengembangan sehingga sulit bagi Indonesia untuk mampu menghasilkan produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan kualitas dan teknologi yang mumpuni; dan konsekuensi yang dihasilkan ialah alutsista milik Indonesia masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri yang mana memerlukan biaya tinggi.

Kerja sama pengadaan dengan negara lain menimbulkan masalah baru. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan luar negeri perlu diiringi dengan kerja sama dalam bentuk alih teknologi (*offset*) yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan penyedia alat pertahanan asing untuk mengembalikan sebagian keuntungan nilai kepada pembeli sebagai syarat jual beli. Pada prakteknya kerja sama tersebut tidak selalu membawa keuntungan, sebagai contoh pada pengiriman Sukhoi-35 sebanyak 11 unit jet tempur yang seharusnya sudah tiba pada awal tahun 2019 belum ada kejelasan lebih lanjut akibat adanya penerapan undang-undang Amerika Serikat yaitu *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CATSAA). Penerapan CATSAA diberlakukan pada setiap negara yang membeli senjata dari Rusia, Korea Utara, dan Iran.

Transparansi dalam pengadaan alutsista yang menjadi salah satu tantangan di tengah anggaran pertahanan yang terbatas. Berdasarkan hal tersebut, upaya pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan pertahanan, khususnya dalam pemenuhan target *Minimum Essential Force* (MEF) alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena industri pertahanan Indonesia masih memiliki keterbatasan kapasitas produksi dan

penguasaan teknologi militer. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi PT Pindad dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Damayanti (2020), teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi (*input*) menjadi hasil produksi (*output*). Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Dalam teori produksi, produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produksi diukur sebagai tingkat hasil produksi (*output*) perperiode waktu karena merupakan konsep aliran.

Teori ekonomi pertahanan merupakan pergerakan perekonomian suatu bangsa dibidang pertahanan yang mencakup tentang alokasi biaya kebutuhan perang, nilai bela negara, nilai nasionalisme dan patriotisme, nilai keadilan, nilai kejungandan nilai pengabdian yang diimplementasikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional sebagai akibat dari kemandirian industri pertahanan oleh negara tertentu (Rifai, dkk., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena adanya data-data yang diperoleh adalah data kualitatif, yakni menggambarkan adanya kondisi riil di lapangan. Jenis data menggunakan data premier yang diambil dari jurnal, buku, sumber elektronik dan hasil diskusi Kuliah Kerja Dalam Negeri Universitas Pertahanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan PT. Pindad Mencapai Kemandirian Industri Pertahanan

PT Pindad (Persero) merupakan salah satu industri pertahanan nasional yang berkembang pesat. Produk pertahanan yang dihasilkannya antara lain senjata, munisi, dan kendaraan tempur. Banyak produk yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut produk militer maupun non militer. Produk yang dikeluarkan pun sudah ramai dipasaran dan sudah di ekspor ke beberapa negara seperti munisi dan kendaraan tempur ke Thailand. Salah satu produk yang sekarang sedang diproduksi secara besar-besaran yaitu, Munisi Kaliber Kecil (MKK) dan juga Mobil Maung.

Munisi Kaliber Kecil (MKK) merupakan produk pertahanan yang masih didapatkan dengan cara impor bahan bakunya. MKK adalah proyektil padat yang terbuat dari logam

yang ditembakkan dari senjata. Munisi terdiri dari lima bagian, yakni proyektil (timbang), kelongsong (*brass*), propelan, rim dan primer. Hentakan palu senapan pada rim memicu tersulutnya primer yang menyebabkan propelan terbakar. Propelan yang dengan cepat terbakar menimbulkan energi yang sangat besar sehingga mampu melesatkan proyektil sampai 1000 meter per detik. Tanpa adanya munisi, senjata tidak dapat berfungsi sebagai alutsista yang memiliki kemampuan merusak.

Saat ini di Indonesia, hanya PT Pindad yang mampu memproduksi munisi kaliber kecil. PT Pindad sudah mampu memproduksi munisi kaliber kecil sesuai dengan standar NATO. Namun dalam proses pembuatannya, PT Pindad masih mengandalkan bahan baku impor. *Brass cup* (selongsong) yang merupakan bahan baku dasar dalam proses pembuatan selongsong munisi, keseluruhannya masih impor, yang dipasok dari Korea. Brass cup merupakan salah satu komponen dari sebuah amunisi untuk senjata api. Selongsong munisi terbuat dari logam paduan kuningan *cartridge brass*, yaitu logam paduan antara unsur tembaga dan seng dengan komposisi 70% tembaga dan 30 % seng (Feng et al, 1994). Proses pembentukan *brass cup* berasal dari kumparan brass strip yang melalui proses dopping. Selongsong munisi memiliki peranan yang sangat penting karena proses ledakan mesiu yang merupakan sumber energi utama untuk laju proyektil terjadi di dalamnya.

PT. Pindad memproduksi senjata militer dan non militer, perusahaan ini memiliki divisi kendaraan khusus yang merupakan salah satu divisi PT. Pindad (Persero) yang menghasilkan kendaraan tempur baik itu kendaraan tempur roda rantai (Tank) maupun kendaraan tempur roda ban (Panser), dll. Salah satu produksi dari PT. Pindad yang baru saja diedarkan adalah mobil Maung.

Mobil Maung merupakan Kendaraan Taktis Ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta jelajah segala medan. Dengan kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6 speed dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2-V4, GPS navigasi, tracker dan perlengkapan lainnya. Mobil maung yang terkenal gahar dan gesit ini juga masih menggunakan bahan baku impor yaitu mesin dari mobil tersebut menggunakan mesin Toyota Hilux dimana mesin tersebut diproduksi dari

negara Thailand yang kemudian diambil oleh Jepang dan dipakai menjadi bahan baku sebagai mesin untuk pembuatan mobil Maung oleh PT. Pindad.

Kemandirian industri pertahanan suatu negara akan selalu berperan positif pada pertumbuhan ekonomi negaranya demikian juga akan berimbas langsung terhadap kekuatan pertahanan negaranya. Karena dengan terbangunnya kemandirian industri pertahanan suatu negara akan menggerakkan roda ekonomi dalam negara tersebut, dalam industri pertahanan yang mandiri akan tercipta proses produksi suatu produk di dalam negerinya. Indonesia menargetkan bisa memproduksi peralatan militernya sendiri dan tidak bergantung pada negara lain pada 2029. Untuk mewujudkannya, pada 2010 negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

Kemandirian bahan baku dalam negeri untuk pemenuhan proses produksi alutsista sebagai bentuk penyelenggaraan kegiatan kemandirian industri pertahanan nasional sangatlah penting. PT. Pindad dalam membuat produk alutsista, meskipun penjualannya naik dalam setiap tahunnya, PT. Pindad masih membuat produknya mengambil dan mengandalkan bahan baku yang berasal dari impor. Sebagai contoh, seperti yang disebutkan sebelumnya, Munisi Kaliber Kecil yang hanya bisa dibuat oleh PT. Pindad di Indonesia namun dalam proses pembuatannya masih menggunakan bahan baku impor dari negara Korea dan juga salah satu yang dibuat baru-baru ini, yaitu mobil Maung, masih menggunakan bahan baku mesin yang dibuat oleh negara Thailand.

Dalam pelaksanaan kemandirian industri pertahanan, PT Pindad masih belum bisa memenuhi tujuan dan cita-citanya dalam kemandirian bahan baku dalam negeri untuk pemenuhan proses produksi alutsista sampai saat ini. Hal ini dikarenakan masih ketergantungannya PT Pindad menggunakan bahan baku impor, sehingga hal ini menyebabkan belum terpenuhinya keinginan dalam membuat produk murni dari negara Indonesia. Ketergantungan ini sangat rentan terkena embargo, yang dapat menyebabkan PT Pindad tidak dapat memproduksi munisi. Embargo adalah suatu bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu negara terhadap negara lainnya guna melakukan upaya isolasi pada barang dari negara lain. Indonesia pernah mengalami embargo yang menyebabkan kelangkaan alutsista. Pada tahun 1995 sampai 2005, Amerika dan sekutunya, NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), mengembargo

alutsistanya untuk dijual ke Indonesia karena Indonesia dianggap melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Dili, Timor Leste. Hal ini berpengaruh besar terhadap kelumpuhan sektor industri pertahanan karena bahan baku impor yang digunakan untuk kegiatan produksi tidak tersedia. Hal ini dapat diatasi dengan mempersiapkan industri nasional, baik BUMN maupun BUMS, untuk mulai memproduksi bahan baku yang digunakan untuk produksi alutsista.

Seperti sejarah yang pernah terjadi, apabila PT. Pindad hingga saat ini masih ketergantungan bahan baku pembuatan alutsista terhadap negara lain, maka terdapat kemungkinan besar Indonesia mendapati krisis dalam pembuatan alutsista jika terjadi konflik dengan negara pengimpor bahan baku tersebut. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan dan cita-cita kemandirian industri pertahanan yang dicanangkan oleh pemerintah. Indonesia sebenarnya memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri *brass forging and casting* yang menghasilkan produk-produk brass seperti *brass strip*, *brass wire* dan *brass tube* yang sebagian besar digunakan untuk keperluan konstruksi. Beberapa perusahaan tersebut berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, diantaranya CV. Dua Putra Petir, PT. Taloe Metal Teknika dan CV. Rhoda Jaya. Selain itu, terdapat juga BUMN yang bergerak dalam *brass forging and casting*, yaitu PT. Krakatau Steel (Persero). Proses pembentukan brass cup berasal dari kumparan *brass strip* yang melalui proses dopping. Salah satu perusahaan yang mampu memproduksi kumparan brass strip dan diproduksi menjadi *brass cup* oleh PT Pindad adalah Jaya Sentosa ST, PT yang berlokasi di Surabaya. Menurut Penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (saat itu Departemen Pertahanan) pada tahun 2002, Jaya Sentosa ST, PT telah mampu membuat paduan logam Cu-Zn 28 14 Balitbang Kemhan, Naskah Kajian tentang Pembuatan Prototipe Kelongsong Munisi Kaliber (28 persen zinc) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan *prototype* selongsong MKK (munisi *caliber* kecil) 7,62 mm14. Namun PT Pindad masih mengandalkan brass cup impor untuk memenuhi bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait kesiapan PT Pindad dalam mengolah *brass strip* menjadi *brass cup* tersebut. Oleh karena itu, diusahakan beberapa tahun kedepan Indonesia bisa lebih mengembangkan produksi murni alutsista tanpa bahan baku impor dari negara lain. PT. Pindad juga diharapkan bisa menggunakan sumber daya pembuatan alutsista dari bahan baku yang ada di perusahaan di Indonesia.

Strategi PT. Pindad dalam Mewujudkan Kemandirian Industri

Kekuatan pertahanan suatu negara akan lebih maksimal apabila didukung dengan kemampuan negara tersebut dalam memproduksi berbagai macam sarana dan prasarana pendukung pertahanan melalui industri pertahanan yang dimilikinya. Dengan adanya kemandirian industri pertahanan, suatu Negara akan mengurangi ketergantungan terhadap Negara lain dalam memenuhi alutsista. Industri strategis suatu negara mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional (Indriyanto, 2017). PT. Pindad sejauh ini telah mampu menciptakan perindustriaan yang mandiri serta mampu meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memproduksi produk-produk Pertahanan dan Keamanan (Hankam) berupa senjata, amunisi, dan kendaraan fungsi khusus serta produk industrial berupa alat berat, infrastruktur perhubungan, dan jasa pertambangan dalam memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri.

Upaya perwujudan kemandirian industri pertahanan PT.Pindad tidak terlepas dari lima pilar strategis yang ditetapkannya, baik dari sisi Pertahanan dan Keamanan (Hankam) maupun dari sisi perindustrian. Kelima pilar strategis ini mendukung PT.Pindad dalam membangun kemandirian industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan alutsista TNI dalam negeri dan dapat diekspor ke luar negeri. Lima pilar strategis PT.Pindad tersebut diantaranya adalah membangun ekosistem *end to end* untuk produk strategis, mendominasi pemenuhan alutsista nasional, melakukan penetrasi ke pasar ekspor produk hankam yang potensial, mengupayakan pendekatan pasar berbasis solusi, serta portofolio industrial prioritas yang sinergitas dengan hankam (Mochtady, 2022). Konsep lima pilar strategis PT.Pindad mengacu pada terciptanya hubungan yang terpadu antara seluruh komponen baik secara internal maupun secara eksternal. Konsep lima pilar strategis Industri pertahanan memiliki arti saling keterkaitan dan saling mendukung antara industri hulu, industri hilir, industri pendukung dan industri terkait lainnya dalam menciptakan kemandirian industri pertahanan nasional. Pilar-pilar strategis ini bertujuan untuk mengatasi tantangan bahan baku PT.Pindad yang selama ini masih diimpor dari luar negeri seperti bahan baku *brass cup* yang masih diimpor dari Korea dan mesin mobil Maung yang masih diimpor dari Jepang.

KESIAPAN PT PINDAD DALAM MEMPRODUKSI ALUTSISTA GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN

Dalam mendukung perwujudan lima pilar strategis kemandirian industri pertahanan, PT.Pindad melakukan beberapa upaya diantaranya manajemen *stakeholder* aktif dengan menjadi *Smart supplier*, menciptakan keunggulan dan kesinambungan dalam pembiayaan, sinergi dan aliansi dengan BUMN dan mitra swasta dalam dan luar negeri untuk ekosistem pertahanan, manajemen anak perusahaan yang strategis, *agile* dan budaya *customer centric*, melakukan penelitian dan pengembangan strategis yang didorong oleh penguatan inovasi dan kebutuhan pasar, serta lean dan keunggulan dalam rantai pasok dan harga bisnis (Mochtady, 2022). Upaya perwujudan kemandirian PT.Pindad sebagai industri pertahanan dalam negeri dapat terlihat dalam langkah-langkah strategis PT.Pindad dalam roadmap transformasi bisnis PT.Pindad sebagai berikut:



Gambar 1. Roadmap transformasi bisnis PT.Pindad

Sumber: Paparan VP Perencanaan Kinerja Perusahaan PT.Pindad pada KKDN, 2022

Industri pertahanan PT.Pindad berupaya untuk menghadapi berbagai tantangan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dapat mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan. Upaya-upaya strategis yang dilakukan PT.Pindad tersebut bertujuan untuk menjadi top 100 perusahaan pertahanan global pada tahun 2024, dengan menawarkan solusi dan produk yang berkualitas tinggi, melalui inovasi dan kemitraan strategis selaras dengan visi perusahaan PT.Pindad.

Dalam upaya tercapainya visi perusahaan industri pertahanan, PT Pindad memiliki langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian perusahaan industri pertahanan yang dikenal dengan SIAP (Selaraskan, Integrasikan, Angkat, Pastikan). Dengan mengimplementasikan SIAP, maka PT.Pindad akan bertransformasi sebagai industri

pertahanan yang maju, kuat, mandiri, berdaya saing, dan terkemuka. Menurut Mochtady (2022), SIAP memiliki beberapa program strategis diantaranya:

1. Selaraskan (*Harmonize*)

PT.Pindad berupaya untuk mengharmonisasikan komitmen dengan pengguna dan pemerintah diantaranya dengan: mengembangkan dan mengusulkan mekanisme tata kelola untuk meningkatkan keterlibatan BUMN dan melengkapi peraturan dalam proses perencanaan dan pengadaan Alpalhankam (termasuk menyelaraskan dengan Renstra TNI); mengembangkan strategi advokasi untuk menjamin Perpres untuk mengunci permintaan/ spesifikasi jangka panjang agar dapat dipenuhi oleh BUMN/ industri lokal; mengusulkan mekanisme pengawasan peningkatan presentase sinergi antar BUMN, dan menyelaraskan pelaksanaan untuk memastikan kepatuhan pada pedoman pengadaan dan syarat/ ketentuan kontrak; merancang dan mengusulkan mekanisme kontrak pengadaan Alpalhankam yang tepat bagi produk *capital intensive* untuk kelancaran arus kas dan pendanaan operasional proyek.

2. Integrasikan (*Integrate*)

PT.Pindad mengintegrasikan rantai pasok dalam ekosistem industri pertahanan dengan memperkuat ekosistem rantai pasok untuk memastikan keunggulan strategis, kualitas, biaya dan *on-time delivery*.

3. Angkat (*Elevate*)

PT. Pindad berupaya mengangkat keunggulan komersial dan sinergi dalam BUMN Industri Pertahanan dengan mengembangkan model operasi optimal untuk memastikan peningkatan sinergi dan keselarasan antar BUMN dan fokus pada pengembangan kompetensi inti (*core competence*) serta mendorong keunggulan/daya saing jadi, komponen, dan MRO) termasuk optimisasi portfolio produk non pertahanan.

4. Pastikan (*Ensure*)

PT.Pindad menjamin keunggulan produk Alpalhankam dengan: membangun kapabilitas industri pertahanan yang selaras dengan kebutuhan Pemerintah/Pengguna; memperluas kapabilitas domestik (berdasarkan kelayakan ekonomi) dalam penguasaan teknologi kunci dan manufaktur komponen utama untuk mengurangi ketergantungan impor;

merancang dan mengimplementasikan program penelitian untuk pengembangan kluster jangka panjang (R&D) dengan memaksimalkan manfaat dari program pemerintah termasuk pelaksanaan IDKLO (PP76); meningkatkan modal insani sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang; mengimplementasikan program *operational excellence* dalam areaarea utama untuk mengoptimalkan biaya, *delivery time* dan kualitas Alpalhankam; serta digitalisasi proses bisnis dalam rantai nilai (*value chain*) dan fungsi pendukung (*support function*).

Peninjauan dari sisi regulasi, perwujudan kemandirian industri pertahanan PT.Pindad juga didukung oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Idhan) yang didalamnya terdapat kewajiban menggunakan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) produksi dalam negeri. Dalam UU Industri Pertahanan tersebut juga didorong upaya alih teknologi, ataupun pendanaan dalam bentuk offset dan juga imbal dagang untuk produk alat peralatan pertahanan dan keamanan yang didatangkan dari luar negeri disebabkan industri pertahanan dalam negeri belum mampu membuatnya. Selain UU Inhan, perwujudan kemandirian industri pertahanan PT.Pindad juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri. Keberhasilan upaya perwujudan kemandirian industri pertahanan PT.Pindad sangat bergantung kepada sinergi lima pilar pelaku industri pertahanan dan berjalannya konsep kluster di atas pada sektor-sektor industri yang saling mendukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan dengan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Tantangan PT.Pindad Mencapai Kemandirian Industri Pertahanan

Banyak Produk yang telah dikeluarkan oleh PT.Pindad dalam produk militer maupun non militer, tentunya produk yang dibuatnya bertujuan untuk nilai ekonomi, khususnya ekonomi pertahanan. Ekonomi Pertahanan merupakan pergerakan perekonomian suatu bangsa dibidang pertahanan yang mencakup tentang alokasi biaya kebutuhan perang, nilai bela negara, nilai nasionalisme dan patriotisme, nilai keadilan, nilai kejuangandan nilai pengabdian yang diimplementasikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional sebagai akibat dari kemandirian industri pertahanan oleh negara

tertentu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT.Pindad untuk mencapai kemandirian industri Pertahanan. Maka, untuk mencapai Kemandirian Industri Pertahanan yang berimbang terhadap kekuatan pertahanan negara, baik secara signifikan dan/atau relevan, Langkah yang dilakukan PT.Pindad untuk mencapai kemandirian adalah dengan terbangunnya industri pertahanan untuk menggerakkan roda ekonomi dalam negara tersebut, dalam industri pertahanan yang mandiri akan tercipta proses produksi suatu produk di dalam negerinya. Selanjutnya inovasi untuk mewujudkan cita cita sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara PT. Pindad membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang memiliki tugas khusus mewujudkan kemandirian industri pertahanan, dengan Kemandirian bahan baku dalam negeri untuk pemenuhan proses produksi alutsista sebagai bentuk penyelenggaraan kegiatan kemandirian industri pertahanan nasional sangatlah penting. PT. Pindad dalam membuat produk alutsista. Selanjutnya, demi mengurangi ketergantungan dengan negara lain terutama sebagai akibat embargo dari negara lain yang berdampak terhadap kelumpuhan sektor industri pertahanan, maka langkah yang diambil adalah dengan mempersiapkan industri nasional, baik BUMN maupun BUMS, atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pertahanan lainnya, langkah ini diambil untuk mulai memproduksi bahan baku yang digunakan untuk produksi alutsista kebutuhan nasional Indonesia.

2. Strategi PT.Pindad dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan.

Kekuatan pertahanan suatu negara akan lebih maksimal apabila didukung dengan kemampuan negara tersebut dalam memproduksi berbagai macam sarana dan prasarana pendukung pertahanan melalui industri pertahanan yang dimilikinya. Dengan adanya kemandirian industri pertahanan, suatu Negara akan mengurangi ketergantungan terhadap Negara lain dalam memenuhi alutsista. Maka PT.Pindad telah memberikan rencana strategi untuk mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dengan perwujudan lima pilar strategis kemandirian Industri Pertahanan, diantaranya manajemen stakeholder aktif dengan menjadi Smart supplier, menciptakan keunggulan dan kesinambungan dalam pembiayaan, sinergi dan aliansi dengan BUMN dan mitra swasta dalam dan luar negeri untuk ekosistem pertahanan, manajemen anak perusahaan yang strategis, agile dan budaya customer centric, melakukan penelitian dan

pengembangan strategis yang didorong oleh penguatan inovasi dan kebutuhan pasar, serta lean dan keunggulan dalam rantai pasok dan harga bisnis (Mochtady, 2022).

Langkah strategi selanjutnya yaitu, dengan mewujudkan kemandirian perusahaan industri pertahanan yang dikenal dengan SIAP (Selaraskan, Integrasikan, Angkat, Pastikan). Dengan mengimplementasikan SIAP, maka PT.Pindad akan bertransformasi sebagai industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri, berdaya saing, dan terkemuka. Langkah Strategis yang di ambil PT.Pindad bertujuan untuk untuk menjadi top 100 perusahaan pertahanan global pada tahun 2024, dengan menawarkan solusi dan produk yang berkualitas tinggi, melalui inovasi dan kemitraan strategis selaras dengan visi perusahaan PT.Pindad.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. (2002). Naskah Kajian tentang Pembuatan Prototipe Kelongsong Munisi Kaliber Kecil (MKK) melalui Pendayagunaan Industri Dalam Negeri. Perpustakaan Balitbang Kemhan. Presentasi dalam Perkuliahan Program Studi Industri Pertahanan, Universitas Pertahanan, Jakarta, 7 Juli.
- BumnInfo. (2019). PT. Pindad: Sejarah Pabrik Senjata Indonesia. Diakses pada 12 Februari 2022, <https://www.bumn.info/info-utama/pt-pindad-sejarah-pabrik-senjata-indonesia>
- Damayanti, M. L. (2020). *Teori produksi*. Jurnal UMSIDA, Vol.1(15).
- Department of Defense of United States of America. (2016). Manufacturing Readiness Level (MRL) Deskbook Version 2016. Department of Defense of United States of America. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Fitri, A., & Debora, S. (2018). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF). Kajian Singkat Terhadap Aktual dan Strategis, 11(22), 25-30.
- Frederick, William H. dan Worden, Robert L. (2011). Indonesia: a Country Study (6th
- Herryanto, Eris. (2017). Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Overview). Makalah
- Indrawan, R. M. J., & Widiyanto, B. (2018). Kebijakan Ofset dalam Membangun Kemandirian Pertahanan Negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 6(2), 29-50.
- Indriyanto, Eko Pur. (2017). Peran PT. Pindad (Persero) dalam Mendukung Alutsista TNI AD. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Darat. Volume 3 (2), 67-76
- Karim, S. (2014). Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kemhan. (2019). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Laporan Data Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan.

Journal of Creative Student Research (JCSR)

Vol.1, No.2 April 2023

e-ISSN: 2963-4776; p-ISSN: 2963-5942, Hal 58-72

Mochtady, H. (2022). Kontribusi PT.Pindad Dalam Menghadapi Lingkungan Strategis Di Era Vuca Guna Mendukung Pertahanan Negara. Kuliah Kerja Dalam Negri. Universitas Pertahanan: Ekonomi Pertahanan.

PT Pindad (Persero). (2017). Pindad Annual Report 2016. Bandung: PT Pindad (Persero).

Rifai, M., Mulyani, M., Saputro, G. E., & Deksino, G. R. (2022). Peningkatan Ekonomi Pertahanan Negara Melalui Implementasi Kebijakan Produksi Kendaraan Tempur ANOA PT PINDAD (PERSERO). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2907-2916.

Susdarwono, E. T. (2020). Pemrograman Linier Permasalahan Ekonomi Pertahanan: Metode Grafik Dan Metode Simpleks. *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, 5(1), 89-104.